## ORGANISASI - KELEMBAGAAN - SEKRETARIAT DAERAH

2019

Peraturan Bupati Gresik NO 28, BD Kabupaten Gresik 2019 (28)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

## ABSTRAK:

- Peraturan Bupati Kabupaten Gresik tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik merupakan upaya penyesuaian nomenklatur Sekretariat Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019. Penetapan Peraturan Bupati tersebut menjadi penting untuk memastikan kejelasan struktur dan tata kerja Sekretariat Daerah guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan di tingkat pemerintahan Kabupaten Gresik. Dengan demikian, Peraturan Bupati tersebut diharapkan dapat membantu dalam optimalisasi kinerja dan pengelolaan administrasi Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan.
- UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 38 Tahun 1974;PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah PP Nomor 72 Tahun 2019;PP Nomor 12 diubah dengan Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 56 Tahun 2019; PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017;
- Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengatur mengenai struktur dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh berbagai bagian dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Pasal-pasal dalam peraturan ini menjelaskan pembagian tugas antara Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta tugas-tugas spesifik yang harus dilaksanakan oleh masing-masing subbagian di dalamnya. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai koordinasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan umum, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, kerjasama daerah, keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugastugasnya untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Gresik.

## CATATAN:

- Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019
- Status Peraturan bupati gresik Tidak Berlaku